

PARTISIPASI POLITIK UMAT KRISTEN SEBAGAI MISI GEREJA DALAM MEWARTAKAN ETIKA KRISTEN DI INDONESIA

Shintikhe Einstein Paramban ^{*1}

Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negara (IAKN) Toraja, Indonesia
zethsesa7@gmail.com

Jolianus

Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negara (IAKN) Toraja, Indonesia
danunjolianus12@gmail.com

Adolpina

Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negara (IAKN) Toraja, Indonesia
martinusbatu8@gmail.com

Oktaviani Indan

Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negara (IAKN) Toraja, Indonesia
oktavianiindan12@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the importance of the church's political participation in its mission as a preacher of Christian ethics in society. The research method used is qualitative descriptive research method. What is qualitative research? It is social in nature by looking at various phenomena and behavior of animals and humans which are the objects of research. A qualitative approach is a method used to describe and describe the things being studied in detail. Researchers use a qualitative approach because it is considered appropriate and makes it easier to obtain data in the field regarding the problem being studied. So the following results were found: The Church's mission is to proclaim the principle of kindness to others, The mission of the Church is to declare that the most general principle of Church social education is the principle of general welfare (Bonham Commune); the mission of the Church is to declare the principle of solidarity; It is a declaration of defense of dignity. , and the mission of the Church to proclaim the principle of rejection of violence.

Keywords: Political participation, church and Christian ethics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya partisipasi politi gereja dalam misinya sebagai pewarta etika kristen dalam lingkup bermasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif bersifat sosial dengan melihat berbagai fenomena dan perilaku hewan dan manusia yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menggambarkan hal-hal yang sedang dipelajari secara rinci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap tepat dan memudahkan dalam memperoleh data di lapangan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga ditemukan hasil sebagai berikut: Misi Gereja dalam mewartakan prinsip kebaikan hati bagi sesama, Misi Gereja dalam mewartakan Prinsip paling umum Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip Kesejahteraan Umum (bonum commune), Misi Gereja dalam mewartakan Prinsip Solidaritas, Misi Gereja dalam mewartakan

¹ Korespondensi Penulis

menjunjung tinggi martabat manusia, dan Misi Gereja dalam mewartakan prinsip penolakan kekerasan.

Kata Kunci: Partisipasi politik, gereja dan etika Kristen.

PENDAHULUAN

Secara historis Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1994, maka sejak saat itu bangsa ini harus mempunyai pemerintahan yang dapat berkuasa. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, berbagai upaya memang harus memahami kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya, termasuk pengembangan kelompok ideologi, asosiasi lokal, dan berbagai yayasan yang fokus pada aktivitas dan penulisan. Berbagai upaya inilah yang menjadi makna “politik” Aristoteles. Oleh karena itu Aristoteles berpendapat bahwa politik harus berorientasi pada upaya menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan, baik dalam bentuk tindakan maupun tulisan (Alvary Exan Rerung, 2023).

Oleh karena itu hakikat kehidupan bermasyarakat adalah aktivitas politik. Karena di mana pun sekelompok orang berkumpul untuk bersosialisasi, selalu ada diskusi politik. Mencermati situasi politik saat ini, umat atau sebaliknya jemaah harus tegas dalam persoalan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagi Kongregasi, penting bagi individu kapel adalah warga untuk memahami pentingnya isu-isu legislatif di negara bagian untuk melaksanakan bantuan pemerintah (shalom) individu, dan bagaimana individu atau gereja harus bertindak dalam misi melalui misi dalam ranah politik, memberi sangatlah penting. Jemaat adalah saudara Tuhan yang terpanggil keluar dari kekaburuan, menjadi milik Tuhan, dan mengalami reklamasi Tuhan. Kongregasi telah diberi misi terhormat oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia , alat pemulihan (Matius 5:13-16). Fungsi Gereja sebagai garam dan terang harus dirasakan dan dialami oleh masyarakat, negara dan bangsa (Yohanis Udju Rohi, 2017).

Dewasa Masih banyak lagi anomali yang terjadi di bidang politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah legislatif sering disamakan pelaksanaan kekuasaan yang tidak bermoral (Robert Borong, 2006). Oleh karena itu, tidak heran jika banyak peristiwa Apa yang terjadi di dunia ini berkaitan dengan persoalan perundang-undangan. Situasi politik di Indonesia semakin memanas menjelang pemilihan pejabat dan parlemen. Banyak pemimpin muda maupun pemimpin lama perlu menaruh perhatian. Keadilan politik di negara tersebut. Manusia adalah makhluk politik, dan sudah menjadi naluri manusia untuk hidup di hadapan publik, hanya dalam kaitannya dengan populasi manusia dapat mencapai moralitas tertinggi, yaitu kemampuan bertindak demi kebaikan bersama. hal-hal yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dibahas dan diperdebatkan untuk mencapai hal tersebut (Ferdinan Samuel Manafe, 2017).

Gereja harus mampu menjalankan misinya di tengah-tengah negara dan bangsa. berbagai bidang kehidupan publik, termasuk masalah legislatif. Secara otoritatif, misi jemaah bukanlah persoalan fungsional legislasi, melainkan pengenalan pemikiran. Renungan dan pemikiran untuk mewartakan sabda shalom demi kemajuan umat manusia di seluruh Indonesia (baik lahiriah maupun batiniah). Saat ini persoalan legislasi lebih baik disebut dan diartikan sebagai makian, bukannya demonstrasi terhormat. Permasalahan legislatif dirasakan dan dilihat sebagai ladang dan sumber kelemahan. Beberapa legislator dianggap rakus, licik, suka menipu, mempunyai standar individualistik, dan sangat egois. Berantakannya persoalan

perundang-undangan, penuh dengan cara berperilaku yang manipulatif dan cara bicara yang hampa, menjadi gambaran yang mewarnai iklim politik di negeri ini (Imran Hasibuan (ed.), 2013) sehingga, penting bagi individu-individu gereja yang merupakan penduduk untuk memahami pentingnya masalah pemerintahan di negara untuk mencapai bantuan pemerintah (shalom) individu, dan bagaimana individu atau gereja harus bertindak dalam misi melalui misi dalam ranah politik, memberi sangatlah penting. Jemaat adalah sanak saudara Tuhan yang terpanggil keluar dari kesuraman, menjadi milik Tuhan, dan mengalami reklamasi Tuhan. Kongregasi telah diberi misi terhormat oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi planet ini, sebuah instrumen reklamasi (Matius 5:13-16). Kemampuan Kongregasi sebagai garam dan terang harus dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara (Yohanis Udju Rohi, 2017).

Untuk itu, partisipasi gereja dalam dunia politik diharapkan menjadi solusi yang sangat penting dalam mengatasi masalah diskriminasi terhadap minoritas Kristen di Indonesia. Ruang politik menjadi wadah memperjuangkan suara minoritas agar segala bentuk diskriminasi terhadap minoritas Kristen dapat ditegakkan. Sebab, kesetaraan perlakuan merupakan syarat utama terciptanya persaingan sehat antar umat beragama. Karena ketika kita berbicara tentang pluralisme agama, maka pertanyaan tentang prinsip-prinsip yang menciptakan perlakuan adil dan persaingan yang sehat menjadi penting.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian sosial yang mengkaji berbagai fenomena dan perilaku hewan dan manusia yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menggambarkan objek penelitian secara rinci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap tepat dan data mengenai masalah yang diteliti dapat dengan mudah diperoleh di lapangan. Menurut Sugijono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki sifat-sifat alam dan kondisi obyektif, pemeriksaan informasi bersifat induktif, dan menyelidiki hasil menekankan makna dibandingkan dengan spekulasi (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jemaat

Secara umum, Kongregasi berasal dari tiga dialek (akar) yang unik. Kata prinsip berasal dari bahasa Portugis “igreja”, kata kedua dari bahasa Latin “ecclesia”, dan kata terakhir dari bahasa Yunani “ekklesia”, yang berarti suatu pertemuan, namun mempunyai makna yang sangat luar biasa. Artinya, berkumpul, berkumpul, atau memanggil. Ini adalah kata yang sering muncul dalam Penguatan Baru, dan baru-baru ini menyiratkan pengumpulan, namun sering kali mengingat pentingnya pertemuan/pertemuan.

Saat ini, kata Ecclesia telah digabungkan dengan penafsiran Gereja Kristen, Terjemahan gereja Kristen didasarkan pada terjemahan Katekismus Heidelberg (Paulus Purwoto, 2020). Namun, seperti ditekankan oleh Tidak ada yang namanya kata Kristen, boland dan Niftrik dalam bukunya, dalam teks asli terjemahan Ekklesia mereka, dan menurut kedua penulis, ekklesia adalah istilah khusus untuk umat Kristen. Oleh karena itu, kata

“Kristen” tidak lagi ada. diperlukan. Sebuah gereja yang secara otomatis menjadikan Anda seorang Kristen (G.C. Van Niftrik dan B.J. Boland, 2016).

Dengan demikian, secara etimologis kata *Εκκλησία* (Ekklesia) mengandung arti orang yang disebut. Mereka yang dipanggil bukanlah hamba atau budak, melainkan orang-orang merdeka, dan mereka dipanggil (dikumpulkan) oleh utusan untuk menghadiri majelis umat. Makna mendasar ini memberi gereja masa kini makna sebagai sebuah tempat di mana orang-orang dipanggil oleh Allah dan diundang untuk berkumpul bersama. Jika ada orang yang mengatakan bahwa jemaat adalah sebuah perkumpulan yang mencoba membentuk hubungan untuk mencapai tujuan tertentu, itu adalah kesalahan yang serius. Karena Paulus dengan jelas menyatakan bahwa panggilan yang muncul untuk menata masyarakat adalah kehendak Allah sendiri (lih. Roma 9:24; Efesus 4:1; 2 Timotius 1:9) (Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ Santo, 2019). Sementara itu, kata majelis sendiri berasal dari bahasa Arab, khususnya “jama'a” yang mengandung arti berkumpul (berkumpul). Namun perlu digarisbawahi bahwa jemaat bukanlah sebuah perkumpulan atau perkumpulan yang berkumpul dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan, melainkan sebuah acara sosial yang dikehendaki Kristus melalui Janji dan Jiwa-Nya (Arozatulo Telaumbanua, 2019).

Pengertian Politik

Permasalahan pemerintahan, sebagai ilmu yang lahir pada abad ke-19 bersama dengan berbagai ilmu penting lainnya seperti geologi, humaniora, dan ilmu sosial, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem berbasis suara, hubungan kekuasaan, masyarakat, pendidikan, budaya, dan tentu saja negara. Permasalahan perundang-undangan merupakan keistimewaan pengawasan dan berasal dari kata Yunani (polis) yang mengandung arti pelaksanaan perkumpulan dalam urusan pemerintahan (Abdul Hadi, 2017).

Pertama, persoalan pemerintahan terletak pada persoalan bantuan pemerintah perseorangan, dan kedua, aktivitas otoritas publik dalam menjalankan kekuasaan yang dimiliki oleh individu sehingga terjamin kekuasaannya sesuai keinginan otoritas publik. ke. Karena individu memberikan kepercayaannya kepada para ahli, isu-isu legislatif membahas individu sebagai pemegang kekuasaan terbesar, dan dapat dikatakan bahwa pengaruh individu harus dijamin. Saat ini permasalahan perundang-undangan dikenal sebagai ilmu yang mengkaji relasi kekuasaan, seperti hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antar bangsa dengan masyarakat, dan antar warga negara (Agung Fakhruzy, 2020).

Hubungan kekuasaan ini diarahkan tentang pembentukan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti bantuan pemerintah kepada masyarakat. Ada sekitar tiga kegiatan yang terjadi dalam masalah legislatif:

1. Arah atau sering disebut navigasi. Apa alasan unsur politik itu sendiri?
2. Strategi publik atau pendekatan umum sehubungan dengan penunjukan juga, perampasan nilai-nilai di mata publik.
3. Kekuasaan dan wewenang. Untuk menerapkan kebijakan yang ada.

Ketika suatu keputusan telah diambil maka yang diperlukan adalah kekuasaan dan wewenang untuk melakukan pengembangan koperasi guna meminimalisir konflik yang timbul (Mohamad Rosyidin, 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri setidaknya memuat tiga pokok bahasan mengenai politik.

1. Membutuhkan pengetahuan tentang hukum dan konstitusi nasional
2. Bertanggung jawab atas landasan sistem pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri.
3. Diperlukan kebijakan dan strategi yang matang untuk menghadapi pemerintah sendiri dan negara lain.
4. Untuk terus menghadapi berbagai hal, kita memerlukan metode tindakan yang efektif. Hadapi segala permasalahan yang muncul (Khoiruddin Manahan Siregar, 2018).

Dengan gambaran di atas, Gaylin mengkarakterisasi persoalan legislasi sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan penafsiran nilai-nilai ke dalam pendekatan publik untuk menjamin ketentraman masyarakat. Kualitasnya adalah akan diubah antara lain kebijakan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja semua nilai tersebut berakar pada tujuan utama: perdamaian dan kesejahteraan rakyat (Rahiman Dani, 2021). Akhirnya, Semua definisi di atas dicantumkan beserta makna yang diberikan oleh Aristoteles. Dengan kata lain:

1. Politik berbicara tentang negara, yang dalam konteks sebelumnya disebut polis. Pembahasan ini juga mencakup keadaan negara tersebut. Artinya bagaimana membangun sistem yang memungkinkan negara menciptakan kelompok yang optimal (kota dan desa, misalnya). Yang terbaik berarti memiliki kedamaian dan kemakmuran.
2. Persoalan legislasi tentu berjumpa dengan sesuatu yang banyak disebut sebagai kekuasaan. Menurut Aristoteles, pembangunan perkumpulan terbaik (negara, kota, kota kecil) yang merupakan cita-cita pemahaman kemaslahatan semua memerlukan kekuasaan di antara individu-individu yang diberi tugas untuk menjalankan perkumpulan tersebut. tersebut. Kekuatan ini diperlukan karena menjadi dasar untuk menerima sesuatu kebijakan dalam menerapkan sistem yang disepakati untuk dicapai tujuannya adalah perdamaian dan kemakmuran.
3. Konsep politik Aristoteles memberikan makna politik kekinian yang membahas tentang kehadiran individu sebagai elemen vital dalam agregat eksistensi bangsa, komunitas perkotaan, kota kecil, dan sebagainya. Pada akhirnya, dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan memandang individu sebagai hal yang penting, maka pihak yang diberi tugas untuk mengawasi sebaiknya dilanjutkan mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan rakyat (Raimundus Bulet Namang, 2020).

Pengertian Misi

Misi mengacu pada sifat misi Gereja Yesus Kristus yang sepenuhnya Alkitabiah. Misi ini bersifat komprehensif, mencakup eselon atas Gereja, pelayanan internal dan eksternal, dan pelayanan eksternal (termasuk dunia politik). Ini tentang mengkomunikasikan seluruh gereja kepada dunia. Isinya adalah untuk mengirimkan tokoh-tokoh otoritas melampaui batas-batas gereja Konfirmasi Baru dan memanfaatkan pengaruh Injil mereka untuk menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus Kristus kepada daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan sangat miskin (daerah-daerah yang terkena dampak politik). berpindah agama, untuk melibatkan dan menduplikasi tempat ibadah terdekat yang beriman dan beriman kepada Yesus

Kristus serta menghasilkan buah Kristiani di komunitas dan negaranya (Yohanis Udju Rohi, 2017).

Relasi Gereja dan Politik

Gereja lebih dari sekedar lembaga ritual keagamaan; gereja adalah instrumen yang dibawa ke dunia oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang Injil kerajaan Penyembahan, kesetaraan, dan keselarasan Tuhan dalam Kristus. Oleh karena itu, Kongregasi terpanggil untuk mengubah keberadaan manusia, umat dan masyarakat. Jemaat mempunyai kemampuan politik moral sebagai lawan “kekuasaan legislatif” dalam membentuk Indonesia menjadi rumah (oikoa, rumah) bagi budaya Indonesia yang majemuk. Sejak masa Permintaan Baru, muncullah kelompok ideologi Kristen, khususnya Kelompok Ideologi Kristen Utama (Parkindo) yang dibentuk pada tahun 1945 yang mengaku sebagai partai patriot, khususnya partai yang memperjuangkan setiap kepentingan rakyat negara. Sesuai dengan visi Kristen tentang kesetaraan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaan. Pada masa Permintaan Baru, banyak aktivis politik Kristen juga mengikuti pertemuan pemerintah seperti Gorongan Karuya (Golkar), dan banyak umat Kristen yang dipercaya menduduki posisi penting pemerintahan pada masa Orde Baru (Zakaria J. Ngelow, 2014).

Pandangan Alkitab tentang Politik

Penulis menjelaskan pandangan politik Alkitab berdasarkan pemahaman tentang gereja dan politik. Istilah masalah pemerintahan tidak muncul secara jelas dalam Buku Bagus. Sekalipun demikian, kita harus benar-benar berusaha memahami bahwa Buku Baik memuat bagian-bagian tentang bagaimana umat Tuhan dan jamaahnya ada di mata publik dan mengkoordinasikan hidup berdampingan mereka.

Dalam standar moral politik yang alkitabiah, pemerintahan yang baik berpusat pada tiga hal: kebijakan yang adil, memihak masyarakat miskin, dan kebebasan masyarakat dari penganiayaan dan kebiadaban. Syair-syair himne yang berhubungan dengan kerja paksa berulang kali mengungkap bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menjawab panggilan masyarakat miskin, benar-benar fokus pada masyarakat miskin, dan mengupayakan keharmonisan sekaligus membatasi kebrutalan. Di balik etika ini terdapat pengakuan bahwa para penguasa yang bekerja sama dalam reklamasi jaringan yang tidak berdaya, miskin, dan disalahgunakan adalah “utusan” Tuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam Kitab Suci Ibrani, ketaatan kepada Tuhan, yang dipisahkan dengan menjaga peraturan dan keadilan Taurat, adalah hal yang penting. menentukan sistem politik, khususnya dalam mengatur kehidupan bangsa Israel (Indria Pricillia Tumbelaka, 2014).

Masalah Legislatif Sesuai dengan Kitab Roma

Pernyataan filosofis Paulus bahwa administrasi adalah "titik tolak, pengaturan, dan pelayanan" Tuhan benar-benar mengandung gagasan politik yang luar biasa. Sejurnya, kejujuran dan kepentingan politik utama dari pemerintahan keagamaan tetap menjadi pendekatan yang dapat diprediksi dari para utusan tersebut. Pemerintahan agama yang dimaksud adalah pemerintahan yang digerakkan oleh Tuhan. Filsafat Paulus mengenai ketaatan kepada otoritas publik (Roma 13:1-7) sering kali digunakan sebagai sumber perspektif

ketika muncul tekanan antara jemaat dan otoritas publik. Negara bisa berubah menjadi prinsip yang meminta kepatuhan tanpa dasar kekuasaan. Pada saat surat Paulus ditulis, penyerahan individu kepada otoritas publik berarti penyerahan kepada pemerintah Romawi yang dipimpin oleh Penguasa Nero. Dari Promosi 64 ke 74, Sovereign Nero adalah seorang kaisar yang sangat kejam dan anti-Kristen. Karena itu, Nero memfitnah umat Kristen dengan menuduh mereka membakar kota Roma. Nero menggunakan kelicikannya untuk menghasut Romawi agar memusnahkan umat Kristen.

Akibatnya, orang-orang Kristen dieksekusi dengan kekejaman yang tidak biasa. Ada yang digunakan untuk menghadapi singa, ada pula yang digunakan sebagai lampu hidup untuk menyalakan pertandingan tempur di malam hari, dan masih banyak lagi yang dimanfaatkan. Faktanya, banyak penginjil yang disiksa dan dibunuh. Pada masa Paulus, umat Kristen di Roma tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Penganiayaan ini membuat masyarakat antusias menantikan kedatangan Yesus kembali. Untuk pertemuan sekitar waktu itu, umat Kristiani tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan dunia, yang penting menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Di sini Paulus ingin membawa jemaat kembali pada realisasi etika Kristiani, termasuk etika politik (Tom Jacobs, Paulus, 1983).

Penekanan Paulus di sini tidak berarti bahwa dunia harus diabaikan, disangkal, atau ditentang oleh umat Kristiani yang menantikan kedatangan Yesus kembali, namun dunia harus dilayani. Paul percaya bahwa pemerintah harus didengarkan dan ditaati karena pada hakikatnya pemerintahan berasal dari Tuhan. Ini tentu merupakan kata yang Benar-benar merupakan tantangan bagi umat Kristiani untuk mengakui siapa saja yang pada saat itu sedang mengalami ketundukan di bawah otoritas Kerajaan Romawi. Apa pun yang terjadi, harapan Paulus di sini adalah agar masyarakat tidak mengabaikan dunia ini dalam kondisi yang paling sulit, namun harus berusaha membangun tatanan dunia yang adil dan tenang, termasuk menciptakan suasana politik yang sempurna dan setara.

Pemerintahan tidak bisa lepas dari setting kebudayaan Romawi sekitar saat itu. Paulus mengajarkan ketaatan terhadap Kerajaan Romawi yang agnostik (otoritas publik dan otoritasnya) sebagai pekerja Tuhan. Saksi Paulus memahami bagaimana kita seharusnya hidup sebagai penduduk dalam Roma 13:1-7. Sidang di Roma diarahkan oleh misionaris Paulus untuk tunduk kepada pemerintah Romawi. Persetujuan terhadap keputusan pemerintah sangat penting bagi umat Kristiani karena mereka bergantung pada otoritas publik dan terikat secara sah padanya. Semua penduduk yang memberontak atau mengabaikan pedoman atau peraturan kemungkinan besar akan mendapat persetujuan dan disiplin dari otoritas publik yang berkuasa (Tom Jacobs, Paulus, 1983).

Alasan Kontribusi Kapel dalam Masalah Pemerintahan

1) Sasaran administrasi:

Persoalan-persoalan pemerintahan penuh dengan kecenderungan-kecenderungan yang membawa malapetaka atau hasutan yang berujung pada pelecehan dan penindasan terhadap banyak individu. Oleh karena itu, jemaat dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan upaya penyelamatan Tuhan (Lukas 4, Matius 25). Kongregasi harus melayani para korban pergerakan politik dan harus mengakui peluang dan kebebasan bersama dalam semua permasalahan sehari-hari, termasuk agama, sekolah dan pekerjaan (Andreas A. Yewangoe, 2008).

2) Tujuan Missioner

Gereja perlu berbicara dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan terhadap seluruh umat manusia (Robert P. Borong).

3) Tujuan Korektif :

Memperbaiki dosa para pemimpin politik. Koreksi dapat diartikan sebagai pelayanan pastoral. Gereja harus meningkatkan kesadaran akan kasih Tuhan bagi mereka yang ingin bertobat dari kesalahannya (Robert P. Borong).

4) Tujuan Normative :

Gereja harus membela kebenaran di tengah kehidupan politik, yakni menjunjung tinggi keadilan dan mewujudkan cinta kasih. Itu sebabnya kekuatan politik dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik adalah menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan dibandingkan manusia (Robert P. Borong).

5) Tujuan Edukatif :

Gereja harus mendidik anggotanya untuk peduli dan memahami panggilan hidupnya. Keterlibatan dalam politik dan peran sebagai pendidik politik bagi anggota gereja (Robert P. Borong).

Pengaruh Politik terhadap Jemaat

Yang paling khas dari persoalan perundang-undangan alkitabiah, Alam Ketuhanan, adalah hadirnya permohonan kehidupan yang memungkinkan ciptaan Tuhan hidup sejahtera, adil, tulus dan benar. Mengkaji keyakinan pemahaman umat Kristiani dalam menafsirkan permasalahan pemerintahan dapat menjadi sumber ketabahan mental untuk menjadikan penafsiran tersebut secara tepat menjadi kenyataan yang substansial. Artinya, agar politik menjadi suatu keharusan dalam pelayanan, dijabarkan pemahaman yang jelas dan nyata tentang sikap keimanan. Meningkatkan prakarsa politik dan partisipasi dalam pembangunan budi pekerti bernegara dan bangsa yang beradab dan beragama. Memperbaiki dan mengembangkan pola kehidupan keagamaan dalam kancan politik masyarakat Indonesia yang bercirikan pluralisme. Mendorong upaya-upaya kehidupan komunitas yang bersatu dan mendorong kerja sama seluruh konstituen di semua tingkatan dan tingkatan. Selama Gereja ada di dunia ini, ia kehilangan kekuatan menentukan dalam menanggapi permasalahan yang mungkin Anda timbulkan.

Keduanya dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Latar belakang sejarah masa lalu masih bisa diterapkan dalam kehidupan kapel saat ini, mulai dari pembangunan gedung gereja, subsidi pembangunan rumah pendeta, hingga bekerja sama dengan seluruh jemaat yang berkumpul di dalam jemaat. Bantuan kepada kuil-kuil terus-menerus diberikan oleh otoritas publik. Tingkat yang paling signifikan adalah dari tingkat perakitan hingga tingkat perakitan. Kongregasi ada di planet ini, dan itu menyiratkan bahwa Kongregasi harus ada. Mencerahkan dunia termasuk masalah pemerintahan. Kebebasan politik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Politik di sini memperjuangkan hak-hak masyarakat (Bruce Chilton, 2004).

Etika Kristen

Dalam bukunya yang berjudul *Christian Ethics: General Edition*, ia menulis: J. Verkuill menjelaskan bahwa Moral berasal dari beberapa kata Yunani yang secara praktis terdengar sangat mirip: ethos dan ethos, atau ta ethika dan ta ethika. Kata ethos mengandung arti adat

istiadat, adat istiadat. Kata èthos dan èthikos berarti kualitas etis, sentimen internal, atau kecenderungan jiwa dalam melakukan suatu aktivitas. Akhlak dalam bahasa Indonesia adalah kualitas mendalam yang berasal dari kata dasar sira yang mengandung arti standar (aturan), aturan hidup, tatanan, mentalitas, keanggunan, tata cara internal, tingkah laku, kebiasaan, dan lain-lain. Kualitas etis, jika dipisahkan, terdiri dari dua kata Sansekerta. Khususnya kata su yang berarti “hebat” dan sila yang berarti kegiatan baik (J Verkuyl. *Etika Kristen*, 2015). Etika tidak menanyakan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia bertindak dan seharusnya bertindak (Jan Hendrik Rapar, 1995).

Lima Standar Moral Kristen dalam Masalah Pemerintahan

Apa yang tersirat dari penjangkauan energi? Jiwa Injil dapat dikatakan terdiri dari tiga mentalitas sentral: jiwa pemujaan, penghargaan terhadap keluhuran manusia (setiap orang sebagai keturunan tercinta Tuhan), dan ketabahan dengan jaringan miskin dan lemah. Jiwa yang kuat ini menunjukkan dirinya dalam tiga pos dan bergabung dengan anggota parlemen Kristen. Oleh karena itu, pembuat undang-undang Kristen mengesampingkan cemoohan atau retribusi. Dia tidak pernah mengeksplorasi orang lain. Dia menolak pembangunan yang dilakukan dengan merugikan kelompok minoritas, penghuni lingkungan, perempuan, dan sebagainya. Selain itu, dia tetap dekat dengan para kurcaci, menjaga kebebasan mereka, memperjuangkan kecenderungan mereka, meminta agar mereka mendapat perhatian khusus.. Ketiga roh ini menjadi ciri para pengikut Kristus dalam kehidupan sosial dan politik di semua negara Kristen. Yang penting adalah bagaimana kita menerjemahkan semangat Injil ke dalam bahasa politik. Ketika umat Kristiani berpartisipasi dalam aktivitas politik, bukan berarti mereka setuju. Ada kemungkinan bahwa umat Kristen mendukung kebijakan politik yang berbeda. Ia tidak mempunyai monopoli atas kebijakan politik. Oleh karena itu, wajar jika terdapat perbedaan pandangan politik di kalangan umat Kristiani. Namun yang tidak dapat kita bedakan adalah semangat evangelikalisme. Dalam pendidikan Gereja saat ini, jiwa yang berkobar-kobar tampak dalam beberapa standar moral Kristiani. Jadi perbedaan-perbedaan dalam pengaturan substansial di antara orang-orang Kristen harus didasarkan pada tujuan-tujuan mendasar yang sama, dan perjuangan orang-orang Kristen tetap memperhatikan standar-standar ini.

Namun lima prinsip berikut sekurang-kurangnya dapat membantu dalam segala perjuangan politik.

1) Misi Gereja dalam mewartakan prinsip kebaikan hati bagi sesama

Secara umum, baik berarti kualitas atau ciri dari sesuatu yang menimbulkan kekaguman. Kata-kata yang baik mencakup kualitas seperti dukungan, rasa hormat, dominasi, rasa hormat, dan ketepatan. Dengan cara ini, aturan kebaikan terkait erat dengan hasrat dan tujuan manusia. Misalnya saja dengan asumsi bahwa individu membutuhkan hal-hal yang bermanfaat dari ilmu pengetahuan;Itu tergantung pada objektivitas ilmiah, kegunaan pengetahuan, rasionalitas, dll. Jika kita menginginkan ketertiban sosial yang baik, maka diperlukan sikap sadar hukum, saling menghormati, dan berperilaku baik (kebiasaan baik). Oleh karena itu, konsep atau prinsip kebaikan mempunyai cakupan yang universal. Keutamaan ritual suatu agama mungkin berbeda dengan ritual agama lain (Muhammad Labolo, 2016).

Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa partisipasi gereja dalam dunia politik diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, rasa hormat antar sesama, berbuat baik kepada sesama, kasih sayang. Ini adalah nilai-nilai yang baik. Hal ini pasti diterima dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tujuan administrasi publik pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat yang baik dan maju.

Sikap baik hati yang diimplementasikan secara holistik, kawan maupun lawan, adalah tuntutan dasar Yesus pada para pengikutnya. Demikian pula tujuan segala pembangunan adalah untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan perdamaian bersama. Bahkan dalam kehidupan politik, umat Kristiani menunjukkan sikap memaafkan, menciptakan perdamaian, dan menghormati.

2) Misi Gereja dalam mewartakan Prinsip paling umum Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip Kesejahteraan Umum (*bonum commune*).

Peningkatan Bantuan pemerintah merupakan komitmen yang dilindungi dan merupakan tujuan terhormat bagi berdirinya Indonesia, namun tujuan terhormat tersebut belum terlaksana dengan baik. Pasalnya, masih banyak warga yang belum merasakan manfaat normal dari bantuan sosial pemerintah. Oleh karena itu, pemenuhan komitmen Konstitusi Indonesia memerlukan aktivitas yang sangat sulit dan tanggung jawab yang tinggi dari otoritas publik. Negara kesejahteraan mengacu pada model pembangunan ideal yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan lebih banyak peran penting bagi bangsa dalam menyediakan layanan sosial universal; inklusif bagi masyarakat (Marsudi Dedi Putra, 2021).

Implikasi dari penjelasan di atas adalah bahwa para politisi dan negarawan, baik di tingkat publik maupun provinsi, diberi tugas untuk mengejar kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau pribadi mereka. Negara dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sebagai tujuan terakhir negara yang sebenarnya. Negara ada untuk rakyat, rakyat tidak ada untuk negara. Dengan cara ini, para pembuat undang-undang Kristen pada umumnya lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingannya sendiri, bahkan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dan kepentingan partainya. Standar ini secara langsung berhubungan dengan pejabat pemerintah yang beragama Kristen yang tidak mengambil bagian dalam tindakan yang merendahkan martabat (waktu, uang, tenaga). Para pembuat undang-undang Kristen melakukan urusan pemerintahan demi bantuan pemerintah terhadap masyarakat dan tidak memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh kelimpahan secara sah (Franz Magnis Suseno, 2014).

3) Misi Gereja dalam mewartakan Prinsip Solidaritas

Iman kepada Yesus Kristus adalah sumber kehidupan pelayanan gereja dan pola kehidupan Kristiani. Akibat wajar dari gaya hidup Kristen adalah bahwa iman kepada Yesus Kristus harus menjadi dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat, dan prinsip ini didasarkan pada prinsip bahwa semua orang sama-sama beruntung dalam pembangunan dan menekankan bahwa kita harus melakukan pengorbanan yang sama dan berbagi manfaat yang sama (Yohanes Yayan Riawan, 2020).

Solidaritas artinya kelompok lemah, miskin dan tidak berdaya harus diprioritaskan (pilihan prioritas bagi masyarakat miskin). Persatuan nasional dapat dilihat dari cara suatu negara memperlakukan anggotanya yang “kurang penting”. Prinsip solidaritas juga mencakup tuntutan agar terwujudnya keadilan sosial menjadi tujuan utama pembangunan. Saat ini,

solidaritas harus diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, umat manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan lingkungan agar generasi mendatang tetap dapat menghuni bumi.

4) Misi Gereja dalam mewartakan menjunjung tinggi martabat manusia

Hak Asasi Kebebasan-kebebasan dasar (HAM) merupakan kumpulan hak-hak istimewa yang dibawa sejak lahir dalam kodrat dan kehadiran manusia sebagai hewan Tuhan Yang Maha Kuasa dan harus dihormati, dipelihara dan diamankan oleh setiap orang mengingat kepedulian yang sah terhadap kualitas regulasi yang tiada tara. pemerintahan dan kehormatan, yang merupakan anugerah dari Tuhan. terlebih lagi, jaminan keluhuran manusia. Penghargaan kita terhadap kebebasan bersama menjelaskan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk menjadi anak-anak yang dikasihi-Nya. Selain itu, umat Kristiani harus membantu kebebasan dan komitmen masyarakat untuk mengambil bagian dalam menentukan nasib negara, dan pada akhirnya mengakui kehidupan mayoritas.

Secara khusus, Central common liberties should not be abused or permitted to happen. This incorporates the forbiddance of erratic killings, the denial of the methodical utilization of physical and mental torment, the disallowance of savage and horrible disciplines, and the preclusion of all limitations on opportunity of religion and confidence as per one's convictions or convictions; This incorporates restrictions against inconsistent capture, subjugation and illegal exploitation. (ladies, minors), murder, burglary, assault, obliteration of jobs of occupants in regions with security issues, persecution as massacre, limitations in view of culture, language, religion or customs.

5) Misi Gereja dalam mewartakan prinsip penolakan kekerasan.

Kami tidak menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan kami, termasuk tujuan yang baik. Segala permasalahan atau konflik yang timbul harus diselesaikan secara damai. Penggunaan intimidasi, intimidasi dan pemaksaan untuk mencapai tujuan pembangunan harus ditolak. Pada dasarnya, semua orang dan semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan komitmen terhadap nir-kekerasan, namun mereka juga menganjurkan kekerasan terhadap orang lain yang namanya agama selalu merugikan banyak orang (Hasim, dkk, 2021).

Dengan demikian, adanya partisipasi politik dari gereja hal-hal yang bersifat kekerasan dapat dilawan dan aktivitasnya diminimalisir kehadiran gereja diharapkan mampu menjaga keutuhan kehidupan yang harmonis dalam tatanan kemajemukan.

KESIMPULAN

Gereja harus terus memberi warna dalam politik Indonesia dengan terus memberikan inspirasi kepada masyarakat, namun gereja tidak boleh terlibat dalam politik (partai politik) yang sebenarnya. Sebab, politisi Kristen adalah garam dan terang di tengah dunia. Yang terpenting bagi politisi Kristen adalah mereka juga harus memperjuangkan Pancasila. Biarkan lima prinsip etika Kristen menjadi standar untuk mengevaluasi ideologi politik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, (2017). "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi," *An Nisa'a* 12, No.1.
- Agung Fakhruzy, (2020). "Mendobrak Kedaulatan Rakyat Dalam Dandera Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, No.1.
- Bruce Chilton, (2004). *Studi Perjanjian Baru bagi Pemula*, BPK Gunung Mulia, Jakarta:
- Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ Santo, (2019). "Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja," *Kharismata: Jurnal Teologi Pentakosta* 2, No.1.
- Abdul Hadi, (2017). "The Place of Ladies in the Islamic Political Framework according to a Phenomenological Point of view," *A Nisa'a* 12, No. 1.
- Agung Fakhruzy, (2020). "Breaking Individuals' Sway in Ideological groups," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, No. 1.
- Bruce Chilton, (2004). *New Confirmation Studies for Amateurs*, BPK Gunung Mulia, Jakarta:
- Dapot Tua Simanjuntak and Joseph Christ Santo, (2019). "The Impact of the Minister's Model Life on Chapel Development," *Kharismata: Diary of Pentecostal Philosophy* 2, No. 1
- Ferdinan Samuel Manafe. (2017). Sikap Kristen Dalam Field Politik. *Missio Ecclesiae*, 6(1), April , 1-16
- GC Van Niftrik dan B.J. Boland, (2016). *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- J Verkuil. (2015). *Etika Kristen: bagian umum*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Jan Hendrik Rapar. (1995). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Imran Hasibuan (ed.), (2013). *Politik Itu Suci Pemikiran dan Praktik Politik Sabam Sirait*, (Jakarta: Gramedia)Indria Pricillia Tumbelaka. (2014). *Gereja Dan Politik Studi Kasus: Persepsi Jemaat Gmim Terhadap Pendeta Yang Terjun Dalam Dunia Politik Praktis*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Khoiruddin Manahan Siregar, (2018). "Integrasi Politik dan Hukum Terhadap Kejahanan Fake Reporting (Hoax) di Indonesia," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu Pengetahuan Islam* 4, No.2.
- Mohammad Rosyidin, (2010). "Integrasi Struktur dan Unit: Teori Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Realisme Neoklasik," *Global: Jurnal Politik Internasional* 10, no. 2.
- Paulus Purwoto, (2020). "Tinjauan Teologis Gereja Sejati dan Penerapannya dalam Pelayanan Gereja Kontemporer," *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, No.1.
- Rahiman Dani, (2021). *Dasar-dasar Teori dan Penerapan Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia)
- Raimundus Bulet Namang, (2020). "Pandangan Aristoteles tentang Negara dan Penduduk," *JIDS: Buku Harian Logis Elemen Sosial* 4, No.2.
- Robert P.Borong, (2015). *Moral Politik Kristen Masalah Akal Sehat Pemerintahan* (Jakarta: Unit Distribusi dan Data serta Tempat Kajian Moral).
- Sugiyono, (2010). *Mencari Tahu Eksplorasi Subjektif* (Bandung: Alfabeta).
- Tom Jacobs, Paulus: (1983). *Kehidupan, Karya dan Filsafatnya*, BPK Gunung Mulia dan Kanisius, Jakarta dan Yogyakarta.
- Yohanis Udju Rohi, (2017). Misi Gereja Melalui Semesta Peranan Legislatif. *Missio Ecclesiae*, 6(1), April, 32-55.
- Yohanis Udju Rohi. (2017). Misi Gereja Melalui Semesta Peranan Legislatif. *Missio Ecclesiae*, 6(1), April, 32-55
- Yohanis Udju Rohi. (2017). Misi Gereja Melalui Semesta Peranan Legislatif. *Missio Ecclesiae*, 6(1), April, 32-55.

Zakaria J. Ngelow. (2014). Membantu membangun Indonesia sebagai rumah khas – tugas jamaah dalam permasalahan legislasi di Indonesia. Buku Harian Jaffray. Jilid 12. No. 2. Oktober. Robert Borong, (2006). Moral Politik Kristen dan Persoalan Legislasi Akal Sehat, Jakarta: UPI dan PSE.